

KEDUDUKAN SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 73/KMA/HK.01/IX/2015 TENTANG PENYUMPAHAN ADVOKAT DALAM KAITANNYA DENGAN PROFESI ADVOKAT

INTISARI

Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tentang Penyempahan Advokat dinilai oleh beberapa masyarakat telah menegaskan dari maksud dan tujuan dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sehingga semenjak diberlakukannya Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut memberikan banyak perubahan terhadap perkembangan Organisasi Advokat itu sendiri.

Adanya penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui: (1) Apa alasan yuridis dari dibentuknya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat dalam kaitannya dengan profesi advokat, dan (2) Bagaimana kedudukan dari Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat. Adapun teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka, serta beberapa sumber dari internet yang selanjutnya akan diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Setelah melalui serangkaian penelitian, maka dapat diketahui bahwa: **Pertama**, Alasan yuridis dikeluarkannya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 didasarkan pada 3 alasan, yakni: (1) Banyaknya surat yang masuk ke Mahkamah Agung dari berbagai pengurus organisasi advokat, perorangan advokat, maupun lembaga negara terkait dengan penyempahan advokat; (2) Adanya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2019 tentang Penyempahan Advokat Jo. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor. 052/KMA/HK.01/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011 tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010; dan (3) Terkait dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009; **Kedua**, Surat Ketua Mahkamah Agung merupakan suatu peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang merupakan hasil dari suatu tindakan diskresi yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Dengan demikian, maka Surat Ketua Mahkamah Agung haruslah dibuat dengan berdasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, supaya pada saat pelaksanaan tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Kata Kunci: *Surat Ketua Mahkamah Agung, Peraturan Kebijakan (Beleidsregel), Organisasi Advokat.*

THE POSITION OF THE LETTER CHIEF OF SUPREME COURT NUMBER 73 /KMA/ HK.01/ IX/2015 CONCERNING ADVOCATE OATH TAKING IN THEIR RELATIONSHIP WITH ADVOCATE PROFESSION

ABSTRACT

Chief of Supreme Court's Letter No. 73 / KMA / HK.01 / IX / 2015 about Advocate Oath Taking is considered by some people to negate the intent and purpose of Law No. 18 of 2003 concerning Advocates. So that since the enactment of the Chief of Supreme Court's Letter, there have been many changes to the development of the Advocate Organization itself.

The existence of this research is an effort to find out: (1) What is the juridical reason for the establishment of the Chief of Supreme Court's Letter No. 73 / KMA / HK.01 / IX / 2015 concerning Advocate Oath Taking in relation to the profession of advocate, and (2) How is the position of the letter of Chief of Supreme Court No. 73 / KMA / HK.01 / IX / 2015 concerning Advocate Oath Taking. The method for legal materials searching in this research was carried out through documentation and literature studies, as well as several sources from the internet which would be inventoried, classified, and analyzed using qualitative juridical analysis.

After a series of studies, it can be known that: **First**, The reasons for juridical formation of the Chief of Supreme Court No. 73 / KMA / HK.01 / IX / 2015 is based on three grounds: (1) The number of incoming mail to Supreme Court from various organizers of advocate organizations, individual and state institutions related to advocate oath taking; (2) Chief of Supreme Court Letter No. 089 / KMA / VI / 2010 dated June 25, 2019 concerning the Advocate Oath Taking Jo Chief of Supreme Court's letter No. 052 / KMA / HK.01 / III / 2011 dated March 23, 2011 concerning Chief of Supreme Court's letter explanation No. 089 / KMA / VI / 2010; and (3) Related to the Constitutional Supreme Court Decision Number 101 / PUU-VII / 2009 dated December 29, 2009; **Second**, the Chief of Supreme Court's Letter is a policy regulation (*beleidsregel*) which is the result of an act of discretion carried out by the Chief of the Supreme Court. Thus, the letter of Chief of Supreme Court shall be made by based on AUPB and not contrary to previous legislation, so that at the time of execution does not cause a conflict of interest.

Keywords: Chief of Supreme Court's Letter, Policy Regulations
(*Beleidsregel*,) Advocate Organization